



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduuk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 selesai disusun. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan suatu media pertanggung jawaban yang sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan aparatur organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta menggambarkan mengenai kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan yang dikerjakan mengacu sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu dapat menggambarkan tentang efisien dan efektivitas biaya, serta kedisiplinan dan ketaatan terhadap jadwal kegiatan yang telah disusun yang merupakan langkah strategis dan tindakan operasional untuk merealisasikan capaian kinerja dan capaian sasaran.

Sejalan dengan adanya ketentuan tersebut, maka dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Kelurga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan akuntabel mengenai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2021, dalam rangka upaya mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 ini disusun semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan datang.

Pelaihari, Maret 2022

Kepala Dinas,



Ir. NOR HIDAYAT

Pembina Utama Muda/(IV/c)

NIP. 19630824 199403 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

➤ **Mekanisme Penyusunan**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

➤ **Mekanisme Pengukuran**

Prioritas kebijakan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah “Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pengendalian penduduk KB, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta meningkatkan perlindungan perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Diskriminasi”.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 telah menetapkan 4 (empat) tujuan, 9 (sembilan) sasaran strategis.

Ke 9 (Sembilan) sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 (Sembilan) indikator kinerja.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Ringkasan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut :

Ikhtisar pencapaian sasaran tahun 2021 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Pro Poor / Pro Job dan SDG's. Selain itu, juga mendukung kebijakan strategis Pemerintah Pusat yaitu Pro Poor dan SDG's, capaian kinerja dengan perincian untuk :

- **Sasaran Satu (1)** : Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan indikator adalah :
 - ✓ Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) realisasi 0,9 dari target 1,61 dengan capaian kinerja 144,10%.
- **Sasaran Dua (2)** : Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun dengan indikator adalah :
 - ✓ Persentase Total Fertility Rate (TFR) realisasi 2,32 dari target 2,27 dengan capaian kinerja 97,80%
- **Sasaran Tiga (3)** : Meningkatnya Kesenjangan Gender dengan indikator adalah :
 - ✓ Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi 70,67% dari target 68,42 dengan capaian kinerja 103,28%
- **Sasaran Empat (4)** : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator adalah :
 - ✓ Skor capaian Kota Layak Anak (KLA) realisasi skor 551 (Pratama) dari target 700 (Madya) dengan capaian kinerja 78,71%.
- **Sasaran Lima (5)** : Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga dengan indikator adalah :
 - ✓ Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan realisasi 100% dari target 100% dari 134 Desa terpenuhi dokumen laporan data;
- **Sasaran Enam (6)** : Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang KB dengan indikator adalah :

- ✓ Persentase PUS yang ber KB terealisasi 83,28% dari target 90% dengan capaian kinerja 92,53%.
- **Sasaran Tujuh (7) :** Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan indikator adalah :
 - ✓ Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) terealisasi 8,56% dari target 9,00 % dengan capaian kinerja 104,89 %.
- **Sasaran Delapan (8) :** Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak dengan dua indikator adalah :
 - ✓ Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan Perempuan dan Anak 26 kasus dengan capaian 100% dari yang melapor 26 kasus tertindaklanjuti 100%.
- **Sasaran Sembilan (9) :** Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dengan indikator adalah :
 - ✓ Prosentase tata kelola administrasi perkantoran dengan capaian 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%.

Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	5
C. Isu Strategis	9
D. Produk dan Layanan	9
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Visi RPJMD	12
B. Misi RPJMD	12
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	12
D. Indikator Kinerja Utama	17
E. Perjanjian Kinerja	17
F. Program dan Kegiatan	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	29
1. Sasaran RPJMD	30
2. Eselon II (Kepala Dinas)	38
3. Eselon III (Sekretaris) A	56
4. Eselon III (Kepala Bidang) B	62
B. Akuntabilitas Keuangan	86
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021	86
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	92
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Strategi Peningkatan Kinerja	110

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu strategi pokok pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan strategi untuk mencapai penurunan laju penduduk (LPP), angka kelahiran (Total Fertility Rate /TFR), keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan kependudukan, KB, perempuan dan perlindungan anak ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengendalian Penduduk, KB dan Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses penurunan laju penduduk (LPP) dan perempuan terhadap program pembangunan.

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan perlindungan Anak maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang salah satunya adalah Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, SOTK Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat betapa pentingnya pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Tanah Laut, maka dituntut kepedulian konkret lebih besar dengan menempatkannya sebagai salah satu bidang program dengan tujuan pengendalian penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, tidak terbatas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan proyek pembangunan.

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
7. Undang-Undang Dasar RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
8. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 3 disebutkan bahwa "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat";
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Tap MPR RI Nomor 4 / MPR / 1999 tentang GBHN 1999, dijelaskan bahwasan bidang sosial dan budaya, kedudukan dan peranan perempuan terdiri dari :
 - Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG).
 - Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai historis perjuangan perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
22. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
23. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
24. Komitmen Sentani dalam memerangi HIV/AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
25. Nota Kesepahaman antara Departemen Sosial RI, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Komunikasi dan Informasi RI dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dan Plan Indonesia Nomor : K. Tel. 232/HK 840/UTP cc/06 dan Nomor : 206/Plan/CO/CD/VII/2006.
26. Peraturan kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 143/HL-010/B5/2009.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
28. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut;

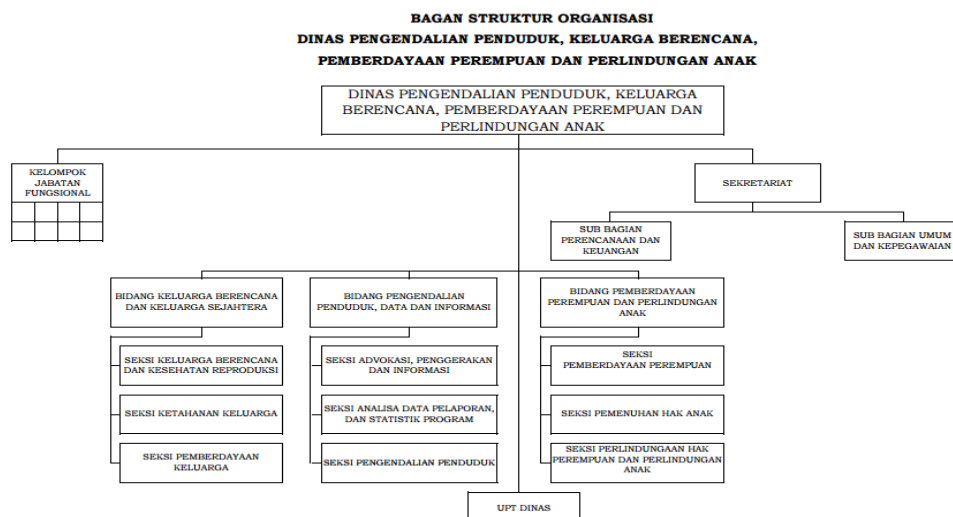
Adapun Tujuan dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai fungsi : Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. Balai Penyuluhan KB; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
3. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan;

- (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- (3) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - (1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - (2) Seksi Keluarga Berencana;
 - (3) Seksi Pemberdayaan Keluarga.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi, terdiri dari :
 - (1) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi ;
 - (2) Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program;
 - (3) Seksi Pengendalian Penduduk.
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per Desember 2021 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS Daerah			
2	PTT Daerah			
	Jumlah			

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	2	4
3	Golongan III	12	1	13
4	Golongan IV	5	5	10
	Jumlah	19	7	27

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	2	1	3
4	DIPLOMA III	0	3	3
5	STRATA I	4	12	16
6	STRATA II	2	3	5
	Jumlah	8	19	27

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Esselon	Jumlah		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	Esselon II	1	0	1
2	Sekretaris	Esselon II	1	0	1
3	Kepala Bidang		2	1	3
4	Kasubbag/Kepala Seksi	Esselon IV	2	9	11
5	Kepala UPT		0	1	1
	Jumlah		6	11	17

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis pada Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk;
2. Tingginya TFR (Total Fertility Rate);
3. Belum optimalnya penyediaan informasi data mikro keluarga;
4. Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber-KB;
5. Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;
6. Belum optimalnya kesetaraan gender;
7. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak;
8. Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
9. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja SKPD.

D. PRODUK DAN LAYANAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana maka produk dan layanan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Advokasi dan Fasilitasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta penyediaan Data Informasi Mikro Keluarga.
2. pelayanan Keluarga Berencana,
3. penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di setiap fasilitas pelayanan kesehatan
4. pelaksanaan penyiapan generasi berencana melalui Pembinaan PIK remaja
5. pembinaan dan evaluasi program Tribina dan terhadap kegiatan program Genre,
6. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
7. Melakukan pendistribusian Alat Kontrasepsi ke klinik tingkat desa;
8. Memberikan persyaratan,kecepatan dan prosedur pelayanan Administrasi perkatoran ;

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka produk dan layanan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Perempuan Peningkatan kualitas hidup perempuan

2. kegiatan Fasilitasi dan kordinasi pelaksanaan pelayanan dan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak
3. pemenuhan hak anak dan pengembangan kabupaten menuju layak anak.

Dari kegiatan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dapat meningkatkan capaian indikator kinerja organisasi serta dalam melaksanakan kegiatan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak selalu berpedoman kepada Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan Undang-undang Dasar RI nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama tahun 2021. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut berpedoman Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi tentang Latar Belakang, Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis, Struktur Organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA, menjelaskan secara ringkas dokumen perjanjian kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program,

kegiatan dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan terkait dengan capaian kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Dalam mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Tanah Laut terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah yaitu : **“TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI (Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi).**

B. MISI RPJMD

Untuk mewujudkan misi Bupati Tanah Laut terkait tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mewujudkan **3 (Misi)** yaitu :

1. **Misi ke I (Satu)** yaitu Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
2. **Misi ke 3 (Tiga)** yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
3. **Misi ke 5 (Lima)** yaitu Membangun Sinergitas yang Baik antar Tingkat Pemerintahan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Keberlangsungan ber KB Serta Pengendalian Angka Kelahiran.
2. Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
3. Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Keuangan yang Baik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran yang akan dicapai sesuai Renstra 2019-2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun);
3. Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga ;
4. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
5. Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang Ber KB;
6. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender
7. Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak
8. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak;
9. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Akhir Renstra
Misi 1 : Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terwujudnya Keberlangsungan ber KB serta Pengendalian Angka Kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,56	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.78	1.66	1.63	1.61	1.58	1.56	1.56
		Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	2,22	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	Anak	2,33	2,33	2,30	2,27	2,24	2,22	2,22
				Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga (Eselon 3)	Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100

				Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB (Eselon 3)	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber KB	%	90	90	90	90	90	90	90
				Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Eselon 3)	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9	9	9	9	9	9	9
Misi 5 : Membangun Sinergitas yang Baik antar Tingkat Pemerintahan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,48	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,38	68,40	68,42	68,44	68,46	68,48	68,48
	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	700	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	skor	550	700	700	700	700	700	700
				Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100

				(Eselon 3)									
Misi 3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Keuangan yang Baik	Persentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Keuangan yang Baik	100	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian 2. Persentase Perencanaan dan Keuangan SKPD. 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	% % Skor	100 100 70 (BB)	100 100 75 (BB)	100 100 75 (BB)	100 100 75 (BB)	100 100 75 (BB)	100 100 75(BB)	100 100 75(BB)

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,61%
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	2,27 Anak
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,44%
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor 700

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2021
Eselon II			
1.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,61 %

2.	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	2,27 Anak
3.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,44 %
4.	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak	Skor capaian KLA	700 skor
Eselon III			
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi			
1.	Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	100%
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
1.	Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber KB	90 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	9%
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Pengaduan	100%
Sekretaris			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian - Persentase Perencanaan dan Keuangan SKPD. - Nilai Akuntabilitas Kinerja 	100 % 100% 75 (BB)

		Instansi Pemerintah SKPD	
Eselon IV			
Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			
1.	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang menerima distribusi alat dan obat kontrasepsi	23 Faskes (Fasilitas Kesehatan)
2.	Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah PUS yang ber-KB	63.968 PUS
3.	Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis kesertaan ber -KB	Jumlah balai KB yang dibina dan di bimbing	11 Balai Penyuluhan KB
4	Mengumpul, mengolah dan menyajikan data keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen data keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi	1 Dokumen
5	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi KB dan KR	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	12 Bulan
Kepala Seksi Ketahanan Keluarga			
1.	Melaksanakan pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL	Jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL yang dibina	50 Kelompok
2.	Melakukan Orientasi BKB	Jumlah Kelompok BKB yang Mengikuti Orientasi	11 Kelompok

3.	Melaksanakan Orientasi Genre Lomba Rangking 1 Genre	Jumlah Kelompok PIK-R yang mengikuti Orientasi	11 Kelompok
Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga			
1.	Melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina	11 Kelompok
2.	Melaksanakan Pelatihan Tentang UPPKS	Jumlah Anggota Kelompok UPPKS yang dilatih dan Adminstrasi menjadi baik	44 Orang
Kepala Seksi Pengendalian Penduduk			
1.	Melaksanakan sosialisasi program pengendalian penduduk	Jumlah mitra kerja yang mengikuti sosialisasi Pengendalian penduduk	10 Mitra Kerja
2.	Melaksanakan pembinaan/sosialisasi Kampung KB	Jumlah Desa kampung KB yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi	22 Kampung KB
3.	Melaksanakan pembinaan/sosialisasi Rumah Dataku	Jumlah Rumah Dataku yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi	22 Rumah Dataku
4.	Melaksanakan kerjasama Koordinasi / fasilitasi bersama koalisi kependudukan	Jumlah kerja sama koordinasi tentang koalisi kependudukan	7 kali koordinasi
5.	Melaksanakan pembinaan/fasilitasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	5 kali
Kepala Seksi Analisa Data, Pelaporan dan Statistik Program			
1.	Melakukan falidasi / Verifikasi data & Informasi	Jumlah data dan statistik KB, PP dan PA yang di validasi	12 Dokumen
2.	Melakukan Bimtek petugas pengolah data penduduk	Jumlah petugas data penduduk yang di Bimtek	40 Petugas PLKB/PKB
3.	Melakukan pengentrian laporan pengendalian laporan dan pelayanan kontrasepsi	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan pelayanan kontrasepsi	12 Dokumen

4.	Melakukan pembinaan dan monitoring pencatatan dan pelaporan	Jumlah pembinaan dan Monev pencatatan dan pelaporan	11 Balai Penyuluh KB
5.	Membuat dan menganalisa data program	Jumlah data program yang di analisis dan disajikan	11 Kecamatan
6.	Membuat laporan tahunan	Dokumen Laporan Tahunan	4 Dokumen
Kepala Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi			
1.	Melakukan penyediaan media informasi KB	Jumlah informasi KB yang dapat di Upload dan di akses	6 Media
2.	Melakukan Monev kegiatan Advokasi, penggerakan dan informasi di balai Penyuluhan	Jumlah monev kegiatan Advokasi, penggerakan dan informasi di balai Penyuluhan	6 Kali Monev
3.	Melaksanakan kegiatan Advokasi, Pergerakan dan informasi di Balai Penyuluhan KB	Jumlah kegiatan Advokasi, Pergerakan dan informasi di Balai Penyuluhan KB	11 Kali
4	Melakukan pembinaan kepada Tim Website Kabupaten	Jumlah pembinaan kepada Tim Website Kabupaten	12 kali
5	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait	8 kali
Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan			
1	Melakukan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kelompok Home Industri Perempuan yang Dibina	38 Kelompok
2	Melakukan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	29 Organisasi
3	Melaksanakan Kegiatan Hari-Hari Besar	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	5 Kali
4	Melakukan Koordinasi dengan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan	15 Organisasi
Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak			

1	Melaksanakan Fasilitas Jambore Forum Anak Daerah	Jumlah Peserta Jambore FAD yang terfasilitasi	40 Peserta
2	Melakukan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Jumlah Lembaga PUG dan Anak yang Mengikuti Sosialisasi	3 Kali Sosialisasi
3	Melakukan Bimtek Petugas Kota Layak Anak	Jumlah Petugas KLA yang Bersertifikat	25 Orang
4	Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi	11 Kecamatan
5	Melaksanakan Monev tentang Keterlibatan Forum Anak Daerah	Jumlah Monev tentang Keterlibatan Forum Anak Daerah	3 Kali
Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak			
1	Melaksanakan Fasilitas Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100
2	Melaksanakan Fasilitas Korban Kasus yang berhubungan dengan Hukum	Jumlah Korban Kasus yang berhubungan dengan Hukum	100
3	Melaksanakan Fasilitas Visum Korban ke Rumah Sakit	Jumlah Korban yang di Visum ke Rumah Sakit	100
Kasubag. Umum dan Kepegawaian			
1	Melakukan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%
2	Melakukan pemenuhan sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi sesuai aturan	100%
3	Melakukan pemeliharaan sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan dimanfaatkan	100%
Kasubag. Perencanaan dan Keuangan			
1	Melakukan penyusunan	Jumlah dokumen	6 Dokumen

	laporan perencanaan dan keuangan	perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu	
2	Menyusun laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	5 Dokumen

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berbagai program dan kegiatan yang mendukung Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	5.272.728.544,-
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.584.771.614,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.584.771.614,-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.612.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.840.200,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.155.920,-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.502.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000,-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.593.880
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.530,-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.530,-
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.718.248,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.600,-

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.040.600,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.687.048,-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.010.552,-
5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.060.552,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.950.000,-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.637.600,-
6	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	22.429.440,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.208.160,-
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	226.784.206,-
1	Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	68.437.420,-
	Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Program KKBPK	26.124.480,-
	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	42.312.940,-
2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	158.346.786,-
	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat IntegrasiProgram	42.995.280,-

	KKBPK di Sektor Lain	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	17.100.000,-
	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	52.837.970,-
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	45.413.536,-
III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	5.169.876.746
1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.086.315.720,-
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.093.970,-
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	206.177.844,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	810.043.900,-
2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.085.528.740,-
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.085.528.740,-
3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.439.782.286,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	793.217.296,-
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.740.310,-

	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50.247.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	568.577.680,-
4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	558.250.000,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	558.250.000,-
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	999.038.735,-
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	999.038.735,-
	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38.659.600,-
1	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	64.164.546,-
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	62.414.596,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	608.800.000,-

	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
	Sub Kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	224.999.993,-
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	260.512.210,-
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	146.837.210,-
1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125.422.210,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	21.415.000,-
2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.675.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	113.675.000,-
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	34.702.436,-
1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34.702.436,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.702.436,-

VII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	221.636.800,-
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	103.769.800,-
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	71.658.300,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	32.111.500,-
2	Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	117.867.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	117.867.000,-
VII	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	578.089.417,-
1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	578.089.417,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	578.089.417,-
TOTAL		12.763.369.094,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A tahun 2021 yang telah disepakati. Untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, penetapan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90	Memuaskan
III	Diatas 70 sampai dengan 80	Sangat Baik
IV	Diatas 60 sampai dengan 70	Baik
V	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisiumum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya</i>	Realisasi ----- X 100%
	<i>jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i> Contoh: Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Target
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target – (Realisasi-Target) ----- X 100%
		Target
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target + (Target- Realisasi) ____X 100%
	Contoh: angka kelahiran total	Target

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. SASARAN RPJMD

RPJMD Kabupaten Tanah Laut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Tabel
Indikator Sasaran Strategis Misi 1

MISI 1 Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	1,38	2,32	31,88%
$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p>					

Angka Kelahiran Total / *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Manfaat TFR adalah sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Pada pengukuran target kinerja TFR jika realisasi semakin rendah maka pencapaian kinerja semakin baik. Realisasi indikator TFR tahun 2021 adalah 2,32 anak, realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 1,38 tahun dengan tingkat capaian 31,88% dengan kategori kurang. TFR sebesar 2,32 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) di Kabupaten Tanah Laut secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya

Tabel
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR}	Anak	2,99	2,51	1,38	2,32	31,88%

Realisasi indikator TFR tahun 2021 adalah 2,32 anak, setiap tahun realisasi TFR semakin rendah sehingga pencapaian target kinerja semakin menuju kearah yang baik. TFR tahun 2021 sebesar 2,32 mengalami peningkatan sebesar 0,2 di bandingkan tahun 2020. Namun demikian dibandingkan dengan target BKKBN Perwakilan Provinsi tahun 2021 yaitu sebesar 2,23, maka realisasi TFR di Kabupaten Tanah Laut berada 0,09 lebih tinggi dari target BKKBN Perwakilan Prov Kalsel dan 0,08 lebih tinggi dari Target TFR Nasional 2,24 data dapat dilihat pada Tabel

Tabel
Capaian Kinerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, dibandingkan dengan Target Provinsi, dan Target Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET NASIONAL	TARGET BKKBN PERWAKILAN PROV. KALSEL	REALISASI KABUPATEN TANAH LAUT
1	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR}	Anak	2,24	2,23	2,32

Belum tercapainya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun) dalam pencapaian target terdapat masalah pada Kepesertaan masyarakat dalam ber-KB belum optimal dengan akar masalah yaitu :

a) Eksternal

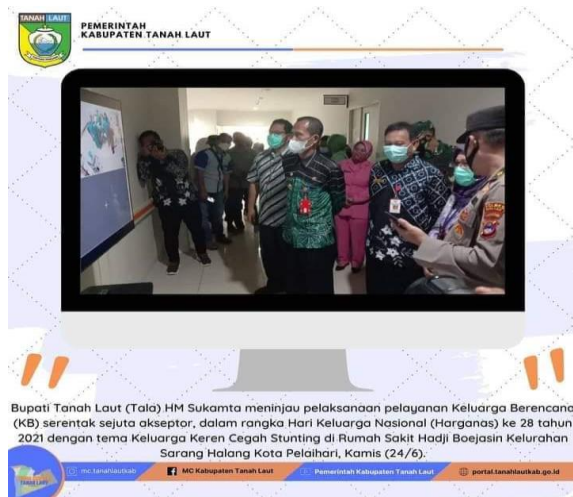
Penguatan advokasi dan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pelaksanaannya masih menemui permasalahan antara lain :

- Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program Bangga Kencana, yaitu terkait kelembagaan , kebijakan, perencanaan

- Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga
 - Pelaksanaan Advokasi dan KIE belum efektif ditandai dengan pengetahuan masyarakat tentang KB dan alat kontrasepsi dan pasangan usia subur /PUS tidak diikuti dengan menjadi peserta KB.
 - Peran tenaga lapangan KB dan bidan dalam konseling KB belum optimal
 - Masih belum optimalnya penyampaian informasi mengenai program Bangga Kencana
- b) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB
- Angka pemakaian kontrasepsi cara modern belum meningkat secara signifikan
 - Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) cukup tinggi
 - Penggunaan alat dan obat metode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) terus meningkat sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah
- c) Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga belum meningkat ditandai dengan 1) masih banyaknya perkawinan diusia muda 2. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15 – 19 tahun cukup tinggi.
- d) Pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah
 - Partisipasi dan pemahaman dan kesadaran keluarga / orang tua yang memiliki remaja masih rendah
 - Kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia belum optimal
 - Kelompok kegiatan (Poktan) terdiri dari BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber KB
- e) Faktor SDM yaitu terbatasnya Tenaga Penyuluh KB yang ada, seharusnya satu Penyuluh KB menangani satu desa namun kondisi saat ini satu Penyuluh KB menangani 3 sampai 4 Desa
- f) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan program Bangga Kencana belum optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Pempuan dan Perlindungan Anak yaitu Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) antara lain :

- 1) Menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan *stakeholders* untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
- 2) Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - a. Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - b. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif melalui strategi:
 - a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - b. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR
 - c. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - d. Menjamin ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di fasilitas kesehatan
- 4) Membuat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188.45/11-KB/KUM/2021, Nomor : 32 Tahun 2021



Keterangan : Foto Kegiatan Pelayanan KB dengan melibatkan lintas sektor

Keterangan : Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang jenis Implan di dalam Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana (MUYAN)



Tabel

Indikator Sasaran Strategis Misi 5

MISI 5					
Membangun sinegritas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
13.	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,75		%

Isu gender merupakan isu multi dimensi meliputi hampir semua aspek dan permasalahan dari berbagai sisi, yaitu: kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Isu Gender juga menjadi salah satu poin dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang

merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Persoalan gender tercantum sebagai tujuan ke-5 dari 17 tujuan SDGs, yakni: *“mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan”*. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Strategi yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah melalui penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan. PUG mendorong kesetaraan gender di seluruh aspek pembangunan melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan serta aspirasi perempuan dan laki-laki, ke dalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, mengintruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian (K/L), Lembaga Tinggi Negara, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur dan para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Untuk mengukur kesetaraan gender dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan menghitung kualitas dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan digunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran konsumsi.

Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil kesenjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Realisasi indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tahun 2021 adalah 87,19 telah belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 88,75 dengan tingkat capaian 98,24% (sangat memuaskan).

Faktor Pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai SDGs 8 yaitu :

- Adanya kerjasama yang baik dengan lintas sektor yang tertuang dalam SK Bupati tentang Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga.
- Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung TPK2D terlihat dalam aktifnya masyarakat dalam mengikuti pembinaan-pembinaan.
- Mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga.

Faktor Penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender (PUG);.
- Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahan pembangunan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan lintas sektoral tentang pentingnya pengarusutamaan gender (PUG);
- Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keahlian contohnya pembuatan kain sasirangan.



Keterangan : Foto kegiatan Pelatihan Sasirangan tanggal 01 s/d 03 September 2021 di Desa Handil Maluka Kec. Bumi Makmur

2. Esselon II (Kepala Dinas)

2.1 Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Nomor : 1

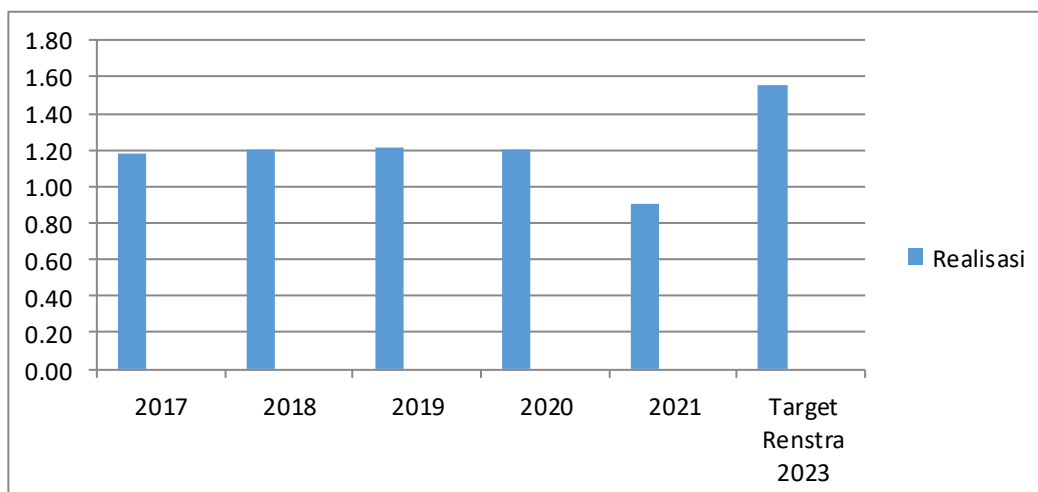
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,61	0,9	144,10	
$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ <p><i>Metode geometri</i> <i>r : Laju pertumbuhan penduduk</i> <i>P_t : Jumlah penduduk tahun t</i> <i>P₀ : Jumlah penduduk tahun awal</i> <i>t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)</i></p>							

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk

Melihat rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tiap tahun selama lima (5) tahun dari data penduduk tercatat bahwa LPP Kabupaten Tanah Laut terjadi **penurunan** dari kurun waktu 2015-2021 **sebesar 0,9%** dari target Renstra **sebesar 1,61%**, sehingga capaian kinerja terdapat sebesar 144,10% (Dapat dilihat pada Tabel di bawah ini). Penurunan ini merupakan sinyal yang baik dalam rangka mendukung program nasional pengendalian jumlah penduduk.

Tabel : Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017 sampai dengan 2021

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET RENSTRA 2023
1.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,18	1,20	1,21	1,20	0,9	1,56



LPP tidak hanya terkait dengan tingkat kelahiran saja, tetapi juga terkait dengan kematian dan migrasi. LPP merupakan isu lintas sektor/bidang, penguatan peran lintas sektor/bidang dalam mencapai penurunan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah dengan menekan/menurunkan angka kelahiran (TFR).

Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran antara lain :

a. Faktor pendukung yaitu :

1. Tersedianya SDM yang mampu mengelola program keluarga berencana termasuk pemberian penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi oleh tenaga penyuluh KB;
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah, organisasi profesi dan mitra kerja dalam mendukung penyelenggaraan program KB dan Kesehatan Reproduksi;
3. Tersedianya jaringan institusi masyarakat (PPKBD/Sub PPKBD, Kelompok kegiatan (Poktan) serta motivator dan kelompok KB Pria) untuk meningkatkan KIE, promosi dan konseling pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
4. Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana kedalam beberapa pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran:

b. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat pada PUS dalam ber KB
2. Peserta KB masih di dominasi perempuan
3. Tingginya pernikahan remaja (< 14 tahun, 15-19 tahun)
4. Rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), KB MKJP kurang diminati dan dipahami oleh masyarakat
5. Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun menggunakan alat kontrasepsi yang kurang efektif (Non MKJP).
6. Angka Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi diatas target yaitu 9%
7. Belum optimalnya melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalui jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah.
2. Masih rendahnya kompetensi SDM memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kepada peserta didik. kepada peserta didik.

c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang pengendalian penduduk, keluarga berencana, melalui website yang dapat di akses semua lapisan masyarakat
2. Melaksanakan Advokasi Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan (MUPEN).
3. Siaran lewat Siaran radio tentang Kependudukan,Keluarga Berencana Memasang Spanduk-spanduk, mencetak Brosur dan Leaflet di bagi ke sekolah-sekolah dan Puskesmas di setiap kecamatan
4. Melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah.
5. Memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kepada pendidik yang menerapkan SSK.
6. Peningkatan sosialisasi secara berkesinambungan kepada peserta didik tentang materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah
7. Peningkatan penyuluhan untuk memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada peserta didik. secara tatap muka melalui Ajang kreatif Gen-Re (Generasi Berencana),Kegiatan tatap muka dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan (Prokes)



Keterangan : Foto Kegiatan Launcing Peresmian Sekolah Siaga kependudukan(SSK) Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah yang menintegrasikan pendidikan kependudukan dan KB (Keluarga berencana) ke dalam mata pelajaran, sebagai pengayaan materi pembelajaran, selain itu, didalam sekolah tersebut ada pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar bagi para peserta didik dalam membentuk generasi keluarga berencana, serta dapat memahami isu kependudukan.

Keterangan : Foto Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan(SSK)



d.Rencana Aksi dalam mencapai sasaran

1. Menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan *stakeholders* untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
2. Membentuk Sekolah Siaga Kependudukan yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana kedalam beberapa pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran:
3. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - a. Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - b. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
4. Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu membuat kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut;

mencapai sasaran menurunnya laju pertumbuhan penduduk di dukung oleh 3 Program dengan pagu Rp 6.395.699.687,- dan realisasi sebesar sebesar Rp 4.697.895.742,- atau 73,45% sebagai berikut:

Tabel Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengendalian Penduduk	226.784.206	205.720.466
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.169.876.746	4.062.125.824
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	999.038.735	430.049.452
Jumlah		6.395.699.687	4.697.895.742

2.2 Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 Tahun (Esselon II)

Nomor : 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	anak	2,27	2,32	97,80	
$TFR = 5 \sum_i^7 = 1 \text{ ASFR } i$							

Angka Kelahiran Total / *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Manfaat TFR adalah sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi,

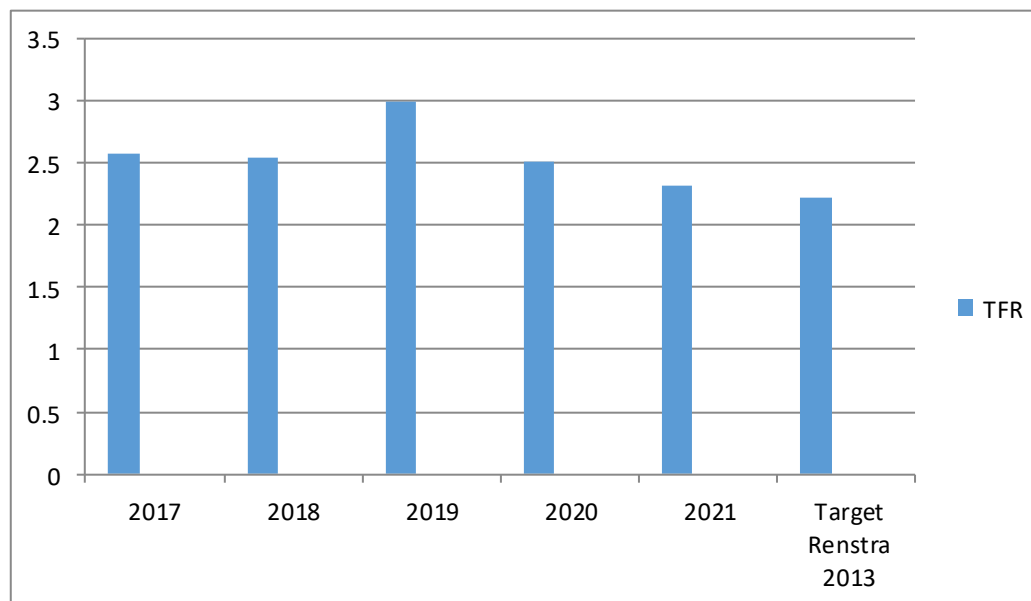
menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Pada pengukuran target kinerja TFR jika realisasi semakin rendah maka pencapaian kinerja semakin baik. Realisasi indikator TFR tahun 2021 adalah 2,32 anak, realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 2,27 tahun dengan tingkat capaian 97,80 dengan kategori capaian sangat memuaskan. TFR sebesar 2,32 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) di Kabupaten Tanah Laut secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya

Realisasi indikator TFR tahun 2021 adalah 2,32 anak, setiap tahun realisasi TFR semakin rendah sehingga pencapaian target kinerja semakin menuju kearah yang baik dan semakin besar peluang untuk tercapainya target Tahun 2023. TFR tahun 2021 sebesar 2,32 mengalami peningkatan sebesar 0,2 di bandingkan tahun 2020. Namun demikian dibandingkan dengan target BKKBN Perwakilan Provinsi tahun 2021 yaitu sebesar 2,23, maka realisasi TFR di Kabupaten Tanah Laut berada 0,09 lebih tinggi dari target BKKBN Perwakilan Prov Kalsel dan 0,08 lebih tinggi dari Target TFR Nasional 2,24

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET RENSTR A 2023
2.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun	2,58	2,54	2,99	2,51	2,32	2,22



Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran antara lain :

a. Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Tersedianya SDM yang mampu mengelola program keluarga berencana termasuk pemberian penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi oleh tenaga penyuluh KB;
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah, organisasi profesi dan mitra kerja dalam mendukung penyelenggaraan program KB dan Kesehatan Reproduksi;
3. Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang yang memfasilitasi pelayanan KB kepada masyarakat
4. Tersedianya jaringan institusi masyarakat (PPKBD/Sub PPKBD, Kelompok kegiatan (Poktan) serta motivator dan kelompok KB Pria) untuk meningkatkan KIE, promosi dan konseling pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
5. Tersedianya Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana (MUYAN) yang dapat memudahkan akses Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang jenis Implan dan IUD
6. Tersedianya Mobil box distribusi Alokon untuk distribusi Alokon ke Fasilitas Kesehatan memadai (Mobil Alokon).

Keterangan : Foto Mobil Box Distribusi Alokasi untuk mengantar Alat dan obat kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan



Keterangan : Foto Pelayanan KB Gratis pada Manunggal Tuntung Pandang dengan menggunakan Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana (MUYAN)



b. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Eksternal

Penguatan advokasi dan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pelaksanaannya masih menemui permasalahan antara lain :

- Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program Bangga Kencana, yaitu terkait kelembagaan , kebijakan, perencanaan

- Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga
 - Pelaksanaan Advokasi dan KIE belum efektif ditandai dengan pengetahuan masyarakat tentang KB dan alat kontrasepsi dan pasangan usia subur /PUS tidak diikuti dengan menjadi peserta KB.
 - Peran tenaga lapangan KB dan bidan dalam konseling KB belum optimal
 - Masih belum optimalnya penyampaian informasi mengenai program Bangga Kencana
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB
 - Angka pemakaian kontrasepsi cara modern belum meningkat secara signifikan
 - Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) cukup tinggi
 - Penggunaan alat dan obat metode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) terus meningkat sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah
 3. Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga belum meningkat ditandai dengan 1) masih banyaknya perkawinan diusia muda 2. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15 – 19 tahun cukup tinggi.
 4. Pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah
 - Partisipasi dan pemahaman dan kesadaran keluarga / orang tua yang memiliki remaja masih rendah
 - Kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia belum optimal
 - Kelompok kegiatan (Poktan) terdiri dari BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber KB
 5. Faktor SDM yaitu terbatasnya Tenaga Penyuluh KB yang ada, seharusnya satu Penyuluh KB menangani satu desa namun kondisi saat ini satu Penyuluh KB menangani 3 sampai 4 Desa
 6. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap

kebijakan pembangunan program Bangga Kencana belum optimal.

7. Kurangnya tenaga penyuluh / PLKB dimana seharusnya 1 PLKB menangani 1 desa, akan tetapi kondisi saat ini 1 PLKB menangani 3 sampai 4 desa.

c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

1. Menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan *stakeholders* untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
2. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif melalui strategi:
 - Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR
 - Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - Menjamin ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di fasilitas kesehatan
4. Membuat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188.45/11-KB/KUM/2021, Nomor : 32 Tahun 2021
5. Penambahan formasi PLKB.



Keterangan gambar : Penyerahan paket bagi akseptor KB MOW di RS H. Boejasin dalam rangka Harganas Tahun 2021



Keterangan gambar : Bersama-sama IBI, Puskesmas Tirta Jaya, Puskesmas Tanjung Habulu dan Kodim 1009 memberikan pelayanan KB pada Kegiatan TMMD di Kecamatan Bajuin.

Keterangan : Foto Pelayanan KB MKJP MOW di RS H. Boejasin dilakukan oleh Dokter Spesialis Kandungan pada tanggal Juni 2021



Keterangan : Foto Kegiatan Bina Keluarga Balita dalam rangka meningkatkan pengetahuan Keluarga Balita dan Penyuluhan KB kepada calon akseptor KB

d. Rencana Aksi yang dilakukan untuk menurunkan TFR yaitu :

1. Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif
2. Pendewasaan usia perkawinan (PUP)
3. Kepala Dinas P2KBP3A menginstruksikan kepada seluruh PKB pembina wilayah desa agar membentuk Kelompok Kegiatan di setiap

desa yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK-R

4. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
 - a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - b. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR
 - c. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - d. Peningkatan KB Pria

Dalam mencapai sasaran Strategis Dinas P2KBP3A memiliki 2 (dua) program yaitu program Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan dana sebesar Rp.6.168.915.481,- terealisasi sebesar Rp.4.492.175.276,- capaian kinerja 72,82%

2.3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender (Esselon II) Nomor : 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,42	70,67	103,28	
1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) Keterangan : Ipar = Indeks Keterwakilan diparlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan Linc-dis = Indeks distribusi Pendapatan							

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan

kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, terutama kepada perempuan kepala rumah tangga. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bekerja sama dengan organisasi wanita Kabupaten Tanah Laut telah mengadakan berbagai macam pelatihan untuk masyarakat (perempuan), khususnya perempuan kepala rumah tangga untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian keluarga yaitu :

1. Pelatihan membuat roti yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalimantan Selatan pada perempuan Desa Handil Maluka dalam program Perempuan yang Terampil Dalam Usaha /Industri Rumahan dan Model Usaha Desa Prima di 13 Kabupaten/Kota Tahun 2021. Pelatihan yang digelar satu hari ini mendatangkan narasumber pelatihan dari IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Prov. Kalimantan Selatan. Diikuti oleh 20 peserta perempuan pada tanggal 10 Juli 2021
2. Pelatihan membuat sasisangan yang diberikan oleh dinas kepada perempuan dan remaja putri Desa Handil Maluka ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan mendatangkan pemilik usaha sasisangan Fanesya sebagai narasumber pelatihan. Diikuti sebanyak 30 peserta perempuan pada tanggal 1 - 3 September 2021
3. Pembinaan pada kelompok industri rumahan perempuan dilakukan pada empat kelompok industri rumahan yang bertempat di Desa Sarikandi (Kurau), Desa Banyu Irang (Bati-Bati), Desa Gunung Makmur (Takisung), dan Desa Batakan (Panyipatan). Akibat pandemi dan pemberlakuan PPKM, produksi setiap industri rumahan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan semangat setiap pelaku industri rumahan agar kualitas dan kuantitas produk yang

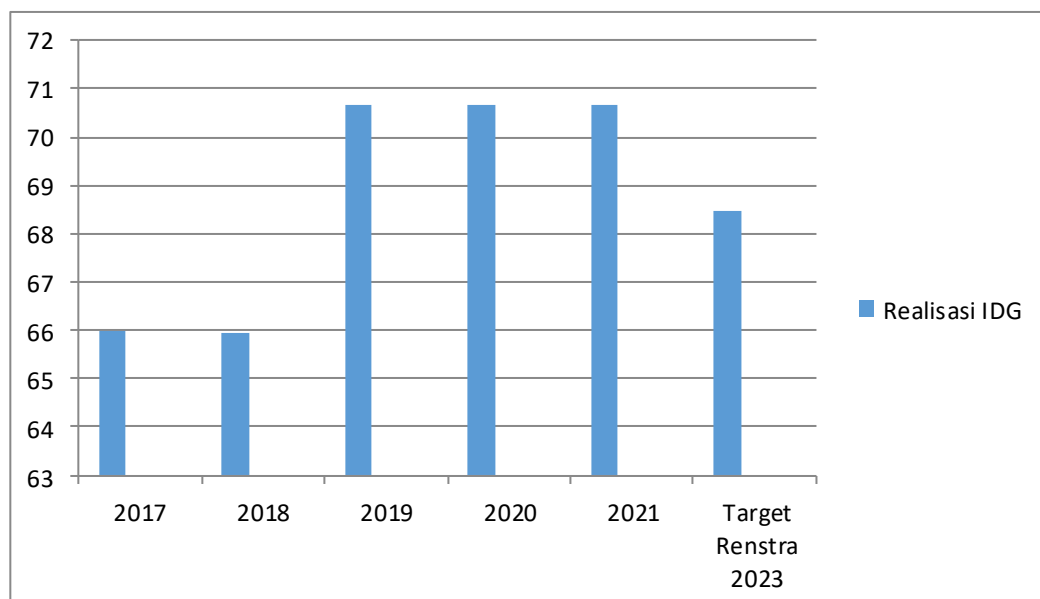
dihasilkan meningkat meski mengalami hambatan pada tanggal 7 - 10 September 2021

Dalam mencapai sasaran Strategis Dinas P2KBP3A memiliki 2 (dua) program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Perlindungan Perempuan dengan dana sebesar Rp 799.726.217 terealisasi sebesar Rp.442.740.958,- capaian kinerja 55,36%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No	Uraian	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET RENSTRA 2023
1	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	65,99	65,95	70,67	70,67	70,67	68,48

Sumber : BPS Tahun 2021



a. Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran antara lain :

1. Penyempurnaan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan agar selalu mendapat masukan dari perspektif gender.
2. Pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan daerah agar berspektif gender.

3. Peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam menerapkan PUG.
4. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG.
5. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat.
6. Penguatan system penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah.
7. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.



Keterangan : Foto kegiatan Pelatihan Sasirangan tanggal 01 sd 03 September di Desa Handil Maluka Kecamatan Bumi Makmur

b. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarustamaan gender (PUG).
2. Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahan pembangunan.

c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

1. Melakukan sosialisasi keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender (PUG).
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahan pembangunan.

2.4 Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak (Esselon II)

Nomor : 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor	700 (Madya)	551 (Pratama)	78,71	
<p>➔ Kriteria Penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian</p> <pre> graph LR Star[Star] --> Inisiasi[Inisiasi 500-600] Inisiasi --> Pratama[Pratama 600-700] Pratama --> Madya[Madya 700-800] Madya --> Nindya[Nindya 800-900] Nindya --> Utama[Utama 900-1000] Utama --> KLA[KLA 900-1000] </pre>							

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wali kota dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan daerah nomor 13 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak.

Pada tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dengan kriteria predikat **Pratama** (551) dari target **Madya** (700).

Dinas P2KBP3A dalam rangka menciptakan Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak melaksanakan operasional pelayanan dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pencegahan Pernikahan Anak

Dinas P2KBP3A Tanah Laut dan Pengadilan Agama Pelaihari telah menandatangani perjanjian kerja sama mengenai program Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Nikah dimana hasil konseling pemohon dispensasi nikah dengan konselor yang telah ditunjuk oleh Dinas P2KBP3AA Tanah Laut menjadi salah satu syarat wajib untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dan juga sebagai rekomendasi atau pertimbangan bagi Pengadilan Agama Pelaihari dalam memberikan keputusan atas pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Diwajibkannya konseling bagi pemohon dispensasi nikah merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak. Komitmen perlindungan anak dengan meminimalisir pernikahan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, melainkan semua *stakeholder* terkait harus ikut berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak. Hanya dengan sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak maka praktek pernikahan anak dapat terhapuskan dengan lebih terstruktur, holistik, dan integratif. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah mengubah pandangan masyarakat mengenai pernikahan anak.

2. Pemenuhan Hak Anak akan identitas

Dinas P2KBP3A melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut membantu dalam proses pembuatan akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA), dan kartu keluarga kepada salah satu klien anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yaitu hak identitas diri.

Anak yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran maka secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara karena namanya tidak tercatat silsilah dan kewarganegaraannya sehingga keberadaannya tidak terlindungi. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dapat menyebabkan resiko eksploitasi anak semakin

tinggi, anak bisa menjadi korban perdagangan manusia dan rentan mengalami kekerasan.

Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Karena begitu pentingnya pencatatan sipil anak, maka pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak seutuhnya, salah satunya dengan berupaya memberikan hak anak yang paling mendasar yakni hak sipil dengan mendapatkan pencatatan kelahiran anak.

3. Pembinaan terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur

Peraturan tentang pekerja anak telah tertuang dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut tercantum ketentuan mengenai larangan bagi siapapun termasuk orang tuanya sendiri untuk mengeksploitasi anak baik secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 76l Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Sanksi terhadap orang tua atau siapa pun yang mengeksploitasi anak baik secara ekonomi dan/atau seksual diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

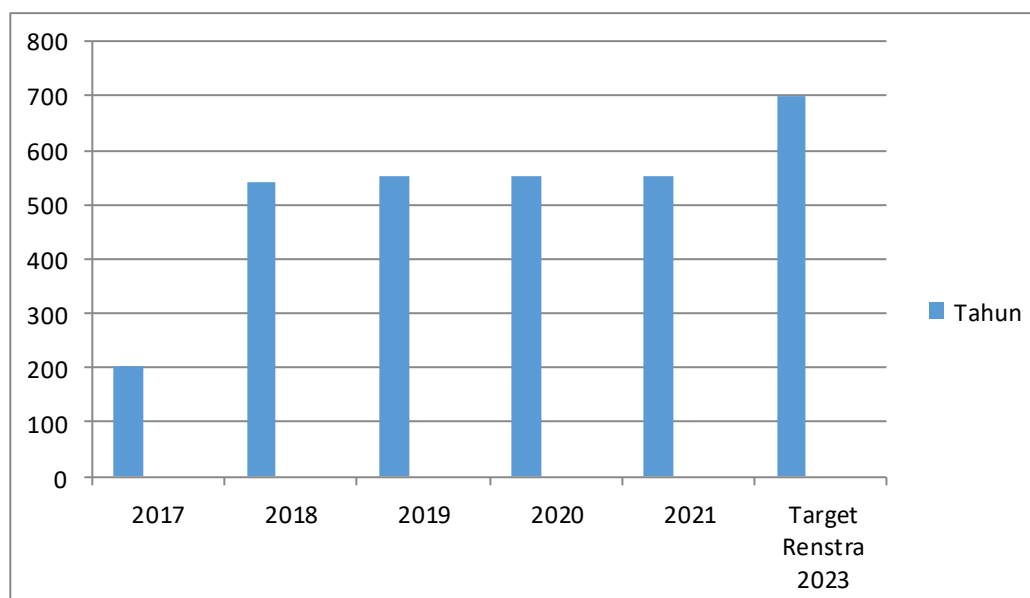
Anak-anak Indonesia memiliki hak yang sama yang harus dipenuhi dan dilindungi demi kepentingan terbaik anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam mencapai sasaran Strategis Dinas P2KBP3A memiliki 2 (dua) program yaitu Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak dengan dana sebesar Rp 295.214.646,- terealisasi sebesar Rp.120.274.671,- capaian kinerja 40,74%.

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

N o	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGE T RENS TRA 2023
4.	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak	204,1	541,70 (Pratama)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	700 (Madya)



Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran antara lain :

a. Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi penggarapan Gugus Tugas KLA di Kecamatan/Desa kerjasama dengan Camat, Kepala Desa dan unsur muspika.
2. Mencetak Leaflet, Brosur, Spanduk tentang Kota Layak Anak (KLA).
3. Siaran lewat media elektronik, siaran radio tentang KLA.
4. Pembuatan Baliho.
5. Melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 11 kecamatan.

b. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Belum semua sekolah dan puskesmas di Kabupaten Tanah Laut didesain Ramah terhadap Anak.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) selalu berganti dikarenakan promosi dan mutasi jabatan, sedangkan SDM tersebut sebagai penggerak program khususnya Gugus Tugas Kota Layak Anak baik di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
3. Belum maksimal peran di luar pemerintah seperti : Dunia Usaha, Lembaga masyarakat dan media.

c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan menciptakan inovasi baru dan terobosan seperti bekerjasama dengan lembaga Pendidikan Ramah Anak menggandeng Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap Sekolah.
2. Mengoptimalkan peran satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPPA) di lingkungan masyarakat.



Keterangan Gambar : Giat Malam yang dilakukan oleh Kabid PPPA, Kasi PHPA, dan Kepala UPTD PPA bersama dengan BNN dan Satpol PP terkait dengan ketertiban masyarakat dan perlindungan anak. Pada kegiatan ini sebanyak 6 anak terjaring bekerja di warung malam dengan 4 anak berasal dari Banjarmasin, 1 dari Kecamatan Takisung, dan 1 anak dari Kecamatan Pelaihari.



Keterangan Gambar : Penampungan dan Advokasi KLA Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan pada anggota Gugus Tugas KLA Tanah Laut

3. Esselon III (Sekretaris) A

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD (Esselon III) Nomor : 9

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1.Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	%	100	100	100	
		2.Persentase perencanaan dan keuangan SKPD	%	100	100	100	
		3.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Skor	75(BB)	71,58(BB)	95,44%	

a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

Rata-rata capaian kinerja bidang Sekretariat tahun 2021 terealisasi 100%.antara lain:

1. Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian dari target 100 tercapai 100 %
2. Persentase perencanaan dan keuangan SKPD dari target 100 tercapai 100%
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD target skor 75 (BB) terealisasi 71,58 dengan capaian 95,44%

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan Persentase tata kelola administrasi perkantoran bisa dilaksanakan 100%.

Perbandingan Persentase perencanaan dan keuangan SKPD dari target 100% (11 Dokumen) tercapai 100%

Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD target skor 75 (BB) terealisasi 71,58 dengan capaian 95,44%

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

N o	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET RENSTRA 2023
1	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	100	100	100	100	100	100
2	Persentase perencanaan dan keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	68,60 (B)	70,40 (BB)	70,47 (BB)	(BB)	71,58 (BB)	75 (BB)

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Persentase tata kelola administrasi perkantoran tahun 2021 di laksanakan 100% dari target 100%.

Persentase perencanaan dan keuangan SKPD dari target 100 tercapai 100%

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD target skor 75 (BB) terealisasi 71,58 dengan capaian 95,44%

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.530
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.584.771.614
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.840.200
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.155.920
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.502.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	2.520.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.593.880
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	22.429.440
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.208.160
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.600
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.040.600
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.687.048
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.060.552

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.950.000
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	568.577.680
JUMLAH				5.841.306.224

e. Analisis Realisasi Anggaran Program

Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sekretariat hampir terlaksana secara keseluruhan pada 2 (dua) Program, 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan dana sebesar Rp. 5.841.306.224,- terealisasi sebesar Rp. 4.977.396.354,- dengan prosentase capaian 85,21%.

3.1 Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Tabel dibawah ini memperlihatkan target realisasi indikator kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Melakukan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%
2	Melakukan pemenuhan sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi sesuai aturan	100%	100%	100%
3	Melakukan pemeliharaan sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan dimanfaatkan	100%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN					100

3.2 Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan

Tabel dibawah ini memperlihatkan target realisasi indikator kinerja Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
2	Menyusun laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
RATA – RATA CAPAIAN					100

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

Rata-rata capaian Kinerja Sekretariat telah terealisasi 100% dari 3 indikator kinerja,

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Keterbatasan tenaga Perencanaan yang profesional penyusunan laporan perencanaan dan keuangan;
- Masih rendahnya kualitas penyusunan laporan perencanaan dan keuangan
- Minimnya data-data yang terkait dengan informasi kinerja, sehingga tidak memberikan informasi yang cukup bagi penyusun untuk melakukan analisis atas capaian kinerja.
- Data-data yang tersedia umumnya hanya data penyerapan anggaran serta realisasi fisik pekerjaan yang bersifat keluaran (out-put).

Faktor pendukung/Rencana aksi dalam mencapai sasaran yaitu:

- Dukungan tenaga Perencanaan yang profesional penyusunan laporan perencanaan dan keuangan;
- Memilih Tim yang bertugas untuk menyusun laporan perencanaan dan keuangan;
- Melakukan metode pengumpulan data dengan prosedur yang standar (Interview/dialog, Dokumentasi/dengan cara mengumpulkan dan

mempelajari catatan-catatan yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan dan laporan).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Rekrutmen tenaga Perencanaan yang profesional;
- Evaluasi terhadap penyusunan laporan perencanaan dan keuangan;
- Pemeriksaan dan pengawasan terhadap data-data yang terkait dengan informasi kinerja.

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan target tahun 2021 dengan tahun 2021 yang terdiri dari indikator Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP, Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi sesuai aturan, Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan dimanfaatkan, Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu, Jumlah dokumen laporan kinerja semuanya terealisasi 100%.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

- Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut di tahun 2020 telah tercapai 100% dari target yang ada. Prosentase capaian dihitung Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP dibagi Total layanan administrasi perkantoran sesuai SOP di kali 100%.
- Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi sesuai aturan yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut di tahun 2020 telah tercapai 100% dari target yang ada.
- Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu. Terealisasi sebanyak 6 dokumen dengan target 6 dokumen, telah terealisasi 100%, Dokumen tersebut yaitu Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD), Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021, Dokumen Rencana Kerja Tahunan, (Renja/RKT) Tahun 2021, Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai dasar pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Tersedianya

dokumen perencanaan dinas P2KBP3A sebagai bagian administrasi yang penting dalam pelaksanaan kegiatan

- Jumlah dokumen laporan kinerja Terealisasi sebanyak 5 dokumen dengan target 5 dokumen, telah terealisasi 100%, Dokumen tersebut yaitu Dokumen Catatan Laporan Atas Keuangan (CALK) Tahun 2020, Dokumen Laporan Kinerja yang di buat setiap Triwulan I, II,III dan IV hasil rekap capaian kinerja SKPD pada tahun berkenaaan.

d. Faktor pendukung/Rencana aksi dalam mencapai sasaran yaitu

- Dukungan sumber daya manusia yang potensial
- Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pada pelayanan yang ada
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai
- Adanya dukungan dari masyarakat penerima pelayanan untuk mengikuti prosedur pelayanan sesuai yang dipersyaratkan


e. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu

- Keterbatasan petugas yang memberikan pelayanan
- Keinginan dan harapan dari masyarakat agar pelayanan dapat diterima dengan cepat sementara pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku

f. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu

- Memaksimalkan pelayanan dengan memanfaatkan dukungan tenaga /staf setempat.
- Memberikan penjelasan secara baik kepada masyarakat tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan.
- Memasang keterangan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di ruang pelayanan.

4. Esselon III (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi) B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
1	Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	%	100	100	100	
<p><u>Jumlah informasi data mikro keluarga di desa/Kel yang tersedia</u> x 100%</p> <p>Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga di desa/Kel..</p> <p> $\frac{1 \text{ Dukomen}}{1 \text{ Dukomen}} \times 100 = 100\%$</p>							

Tahun 2021 target penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan sebesar 100% dan terealisasi 100% berupa satu (1) buah dokumen.

a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET RENSTR A 2023
1.	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100	100

Rata-rata capaian kinerja bidang pengendalian penduduk, data dan informasi sudah terealisasi 100%.

Faktor pendukung/Rencana aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

- Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder Pendataan Keluarga;
- Menyediakan sarana dan prasarana pendataan keluarga sesuai dengan kebutuhan;
- Mendaya-gunakan sumber daya yang ada di lini lapangan;
- Meningkatkan kompetensi SDM pelaksana Pendataan keluarga;
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan Pendataan Keluarga.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu:

- Belum optimalnya Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder Pendataan Keluarga;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendataan keluarga sesuai dengan kebutuhan;
- Belum optimalnya Mendaya-gunakan sumber daya yang ada di lini lapangan;
- Terbatasnya kompetensi SDM pelaksana Pendataan keluarga;
- Belum optimalnya Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan Pendataan Keluarga.

Upaya/Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu:

- Melakukan sosialisasi dan koordinasi Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder Pendataan Keluarga;
- Membentuk Tim Posko koordinasi Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder Pendataan Keluarga;
- Meyelenggarakan Pelatihan dan Pengembangan sumber daya yang ada di lini lapangan;
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan Pendataan Keluarga melalui berbagai media. Seperti Siaran radio, Surat Kabar, baliho dan media lainnya.

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan target tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dari indikator Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tercapai 100% yang berupa sebuah dukomen.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tercapai 100% yang di laporkan oleh PPL-KB setiap bulan kepada bidang pengendalian penduduk, data dan informasi sehingga hasil laporan data tersebut di rekap menjadi sebuah dulomen data dan informasi.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGITAN	ANGGARAN (Rp)
1 <				

e. Realisasi Anggaran Program

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengendalian penduduk, data dan informasi tahun 2021 pagu sebesar Rp. 296.878.182,- terealisasi sebesar Rp. 275.659.642,- dengan capaian 92,85%.

4.1 Eselon IV Kepala Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program

B.1

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program tahun 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melakukan falidasi / Verifikasi data & Informasi	Jumlah data dan statistik KB, PP dan PA	12 Kali	12 Kali	100
2.	Melakukan Bimtek petugas pengolah data penduduk	Jumlah petugas data penduduk yang di Bimtek	40 Petugas PLKB/PKB	35 Petugas PLKB/PKB	87,5
3.	Melakukan pengentrian laporan pengendalian laporan dan pelayanan kontrasepsi	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan pelayanan kontrasepsi	11 Balai Penyuluh KB 24 Faskes	11 Balai Penyuluh KB 24 Faskes	100
4.	Melakukan pembinaan dan monitoring pencatatan dan pelaporan	Jumlah pembinaan dan Monev pencatatan dan pelaporan	11 Balai Penyuluh KB	11 Balai Penyuluh KB	100
5.	Membuat dan menganalisa data program	Jumlah data program yang di analisis dan disajikan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100
6.	Membuat laporan tahunan	Dokumen Laporan Tahunan	4 Dokumen	4 Dokumen	100

RATA - RATA CAPAIAN	97,92
----------------------------	--------------

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program tahun 2021 terealisasi 97,92%, hal ini menunjukkan kegiatan Analisa data pelaporan dan Statistik program telah terlaksana sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET RENSTR A 2023
1.	Jumlah data dan statistik KB, PP dan PA	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah petugas data penduduk yang di Bimtek	100	100	100	100	87,5	100
3	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan pelayanan kontrasepsi	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah pembinaan dan Monev pencatatan dan pelaporan	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah data program yang di analisis dan disajikan	100	100	100	100	100	100
6	Dokumen Laporan Tahunan	100	100	100	100	100	100

b. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dari indikator Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tercapai 100% yang berupa sebuah dokumen.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah data dan statistik KB, PP dan PA, dilakukan sebanyak 12 kali terealisasi 100 %
- Jumlah petugas data penduduk yang di Bimtek, jumlah petugas yang di bimtek sebanyak 35 Petugas PLKB/PKB terealisasi 87,5% ,
- Jumlah dokumen laporan pengendalian dan pelayanan kontrasepsi, Melakukan pengentrian laporan pengendalian , laporan dan pelayanan kontrasepsi di 11 Balai penyuluhan KB dan 24 Faskes (Fasilitas Kesehatan), terealisasi 100% Sehingga laporan direkap menjadi sebuah dokumen.
- Jumlah pembinaan dan Monev pencatatan dan pelaporan, Melakukan pembinaan dan monitoring pencatatan dan pelaporan di 11 Balai Penyuluhan KB terealisasi 100 %, karena hasil dari pembinaan harus dilakukan Monitoring (Monev).
- Jumlah data program yang di analisis dan disajikan , Membuat dan menganalisa data program di 11 Kecamatan terealisasi 100%, data keluarga wajib di buat dan di analisa sehingga data yang diperlukan Up-to date.

d. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Laporan data yang diminta dari Kabupaten ke kecamatan tidak tepat waktu.
2. Sulitnya mengumpulkan data tepat waktu dan Akurat.

e. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

1. Pembinaan dan melaksanakan Monev ke Kecamatan
2. Melaksanakan sosialisasi tentang data
3. Perbaikan aplikasi sistem informasi data sering terjadi gangguan

f. Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Melakukan tatap muka dengan PKB masing-masing kecamatan
2. Pembinaan ke PKB secara berkesinambungan/kontinyu

3. Sosialisasi tentang Aplikasi data
4. Penganjangan Kampung Keluarga Berkualitas sekaligus Membentuk/Membuat Rumah Dataku di Kampung Keluarga Berkualitas.



Keterangan : Foto Kegiatan Penganjangan Kampung Keluarga Berkualitas dan Rumah Dataku di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin tanggal 9 September 2021

4.2 Eselon IV Kepala Seksi Pengendalian Penduduk B.2

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Pengendalian Penduduk tahun 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan sosialisasi program pengendalian penduduk	Jumlah mitra kerja yang mengikuti sosialisasi Pengendalian penduduk	10 Mitra Kerja	10 Mitra Kerja	100
2.	Melaksanakan pembinaan/sosialisasi Kampung KB	Jumlah Desa kampung KB yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi	22 kampung KB	23 kampung KB	104,54
3.	Melaksanakan pembinaan/sosialisasi Rumah Dataku	Jumlah Rumah Dataku yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi	22 Rumah Dataku	22 Rumah Dataku	100
4.	Melaksanakan	Jumlah kerja	7 kali	2 kali	28,57

	kerjasama Koordinasi / fasilitasi bersama koalisi kependudukan	sama koordinasi tentang koalisi kependudukan	koordinasi	koordinasi	
5.	Melaksanakan pembinaan/fasilitasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	5 kali	6 kali	120
RATA - RATA CAPAIAN					92,18

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dalam kegiatan sosialisasi program pengendalian penduduk terealisasi 92,18%, hal ini menunjukkan bahwa seluruh kinerja utama sosialisasi program pengendalian penduduk telah terlaksana dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2020 (100%) dan tahun 2021(92,18%), hal ini menunjukkan adanya hasil keluaran yang dicapai terjadi penurunan

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

3.1. Jumlah mitra kerja yang mengikuti sosialisasi Program Pengendalian Penduduk dengan target 10 Mitra Kerja terealisasi 100% , mitra kerja yang mengikuti sosialisasi Program Pengendalian Penduduk antara lain :

- Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Laut
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
- Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut
- Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Laut
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
- Bappeda Kabupaten Tanah Laut
- Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

- BPKAD Kabupaten Tanah Laut
 - Dinas PMPD kabupaten Tanah Laut
- 3.2. Jumlah Desa kampung KB yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi dari target 22 kampung KB teralisasi 120 %, adapun desa kampung KB yang mengikuti Sosialisasi adalah Desa Swarangan, Desa Bajuin, Desa Martadah, Desa Benua Raya, Desa Swarangan, Desa Jorong, Desa Asam-Asam, Desa Martadah, Desa Panggung, Desa Mekar Sari, Desa Kintap Kecil, Desa Kurau, Desa Labuan Emas, Desa Panyipatan, Desa Sungai Riam, Desa Martadah, Desa Ujung bati-Bati, Desa Kebun Raya Kintap, Desa Muara Asa-Asam, Desa Tanjung Pelaihari, Desa Maluka Baulin Kurau, Desa Raden Kurau, Desa Tambak Sarinah Kurau, Desa Srikandi Kurau, Desa Ketapang.
- 3.3. Jumlah Rumah Dataku yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi dari target 22 Rumah Dataku terealisasi 100% ..
- 3.4. Jumlah pembinaan Sekolah Siaga (SSK) dari target 5 kali terealisasi 1 kali 28,57%.

4.3 Eselon IV Kepala Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi B.3

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REAIASASI	CAPAIAN (%)
1.	Melakukan penyediaan media informasi KB	Jumlah informasi KB yang dapat di Upload dan di akses	6 Media	4 Media	100
2.	Melakukan Monev kegiatan Advokasi, penggerakan dan informasi di balai Penyuluhan	Jumlah monev kegiatan Advokasi, penggerakan dan informasi di balai Penyuluhan	6 Kali Monev	6 Kali Monev	100
3.	Melaksanakan kegiatan Advokasi, Pergerakan dan informasi di Balai Penyuluhan KB	Jumlah kegiatan Advokasi, Pergerakan dan informasi di Balai Penyuluhan KB	11 balai Penyuluhan KB	11 balai Penyuluhan KB	100

4.	Melakukan pembinaan kepada Tim Website Kabupaten	Jumlah pembinaan kepada Tim Website Kabupaten	12 kali	12 kali	100
5.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait	8 kali	20 kali	100
RATA - RATA CAPAIAN					100



a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Advokasi, Penggerakan dan Informasi terealisasi 100% , hal ini menunjukkan bahwa seluruh kinerja utama kegiatan Advokasi Pelayanan KIE telah terlaksana dengan hasil yang sesuai target.

b. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2020 100% dan tahun 2021 100%, hal ini menunjukkan adanya hasil keluaran yang dicapai memenuhi target.

5. Esselon III (Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera) B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
1	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	9	8,56	104,89%	
2	Meningkatnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber-KB	Persentase pasangan Usia Subur yang ber-KB	%	90	83,28	92,53%	
<p>Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah PUS x 100%</p> <div style="text-align: right;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $\frac{5.473}{63.968} \times 100 = 8,59\%$ </div> </div> <p>Jumlah Peserta KB Aktif X 100 % Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)</p> <div style="text-align: right;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $\frac{53.277}{63.968} \times 100 \% = 83,28\%$ </div> </div>							

a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

N o	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET RENSTR A 2023
1.	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	12,76	10,20	8,12	7,75	8,56	9
2.	Meningkatnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB	78,76	80,81	83,60	83,75	83,28	77,76

Rata-rata capaian kinerja bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk tahun 2021 target Unmet Need pada dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah laut sebesar 9% terealisasi 8,59% capaian kinerja 104,88%. Pemahaman PUS tentang ber KB dari target 90% terealisasi sebesar 83,28% dengan capaian kinerja 92,53%

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan target tahun 2021 dari indikator Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) tercapai 8,59% dibanding tahun 2020 lebih tinggi, namun masih lebih rendah dari target tahun 2021, semakin rendah capaian unmeet need semakin baik.

Perbandingan target tahun 2021 dengan tahun 2020 dari indikator persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB tercapai 92,53% lebih rendah dari capaian tahun 2020.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) pada bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 tercapai 8,59% dari target

9 %,semakin rendah capaian unmet need semakin baik karena bisa menekan angka kelahiran dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB tercapai 83,28% dari target 90% sehingga capaian kinerja sebesar 92,53%, ini hampir mendekati target, ini menunjukkan kenaikan karena animo PUS yang ber-KB cukup sadar dan paham tentang program ikut KB.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	206.177.844
			2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	810.043.900
		2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.085.528.740
		1. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50.247.000
			2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	793.217.296
			3. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.740.310
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	224.999.993

	(KS)	Keluarga	2. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38.659.600
			3. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	64.164.546
			4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	608.800.000
			5. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	62.414.596
JUMLAH				4.971.993.825

e. Analisis Realisasi Anggaran Program

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang KB dan KS hampir terlaksana secara keseluruhan yaitu dari pagu Rp. **4.971.993.825** terealisasi sebesar Rp. **3.921.526.100,-** dengan prosentase capaian **78,87%**

5.1 Eselon IV Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

B.4

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Menyiapkan Bahan dan Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan	Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi yang Tersedia	23 Fasilitas Kesehatan	23 Fasilitas Kesehatan	100

	Obat Kontrasepsi				
2.	Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah Pasangan Usia Subur yang Ber-KB	63.968 PUS	53.277 PUS	83,28
3.	Melakukan Penyiapan Bahan Pembinaan, Pembimbingan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Kesertaan ber-KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang dibina dan dibimbing	11 Balai Penyuluhan KB	11 Balai Penyuluhan KB	100
4.	Mengumpul, Mengolah dan Menyajikan Data Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Data Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5.	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi KB dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan	12 (Bulan)	12 (Bulan)	100
RATA - RATA CAPAIAN					96,66

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi tahun 2021 terealisasi dengan rata-rata capaian 96,66%, hal ini menunjukkan kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana telah terlaksana sesuai prosedur, tugas, fungsi dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

b. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (96,66%) dan tahun 2020 (96,72%).

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah alat obat kontrasepsi yang tersedia sebanyak 23 Faskes (Fasilitas Kesehatan) dengan target 23 Faskes (Fasilitas Kesehatan)

teralisasi 100% berarti .distribusi alat obat kontrasepsi terpenuhi sesuai kebutuhan.

- Jumlah PUS yang ber-KB dari target 63.968 PUS teralisasi 53.277 PUS peserta KB
- Jumlah balai KB yang dibina dan di bimbing dari 11 Balai KB teralisasi 100%, pembinaan dilakukan secara rutin sebagai penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis kesertaan ber KB.
- Jumlah dokumen data keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi dari target 1 Dokumen teralisasi 100%, Mengumpul, mengolah dan menyajikan data keluarga berencana dan kesehatan reproduksi harus direkap dan menjadi sumber informasi data keluarga yang up to date/terbaru.
- Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dari target 12 (Bulan) teralisasi 100%, Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi KB dan Kesehatan wajib dilakukan karena sebagai bahan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan program di lapangan kepada pimpinan.

5.2 Esselon IV . Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga B.5

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga tahun 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina	11 Kelompok	100	100
2.	Melaksanakan Pelatihan Tentang UPPKS	Jumlah Anggota Kelompok UPPKS yang dilatih dan	44 Orang	100	100

		Adminstrasi menjadi baik			
RATA - RATA CAPAIAN					100

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Keluarga tahun 2021 terealisasi dengan rata-rata capaian 100%, hal ini menunjukkan kegiatan pembinaan pemberdayaan Ekonomi keluarga, lomba UPPKS dan pelatihan tentang UPPKS telah terlaksana sesuai prosedur, tugas, fungsi dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

b. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (100%) dan tahun 2020 (100%), hal ini menunjukkan kegiatan pembinaan pemberdayaan Ekonomi keluarga, lomba UPPKS dan pelatihan tentang UPPKS telah terlaksana 100%.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah kelompok UPPKS (11 kelompok) yang dibina di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah kelompok UPPKS yang dinilai (11 kelompok) dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah kelompok UPPKS yang dilatih dan adminstrasi menjadi baik (11 orang)di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

5.3 Esselon IV Kepala Seksi Ketahanan Keluarga B.6

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Ketahanan Keluarga tahun 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL	Jumlah Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL	50 Kelompok	33 Kelompok	66
2.	Melakukan Orientasi BKB	Jumlah Kelompok BKB yang Mengikuti Orientasi	11 Kelompok	11 Kelompok	100
3.	Melaksanakan Orientasi Genre Lomba Rangking 1 Genre	Jumlah Kelompok PIK-R yang mengikuti Orientasi	11 Kelompok	11 Kelompok	100
RATA - RATA CAPAIAN					86,67

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Kepala Kepala Seksi Ketahanan Keluarga dalam kegiatan pembinaan petugas pengelola program KB terealisasi 86,67% ,hal menunjukkan bahwa seluruh kinerja utama kegiatan sudah terlaksana sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (86,67%) dan tahun 2020 (86,67%), hal ini menunjukkan adanya capaian kinerja sama dengan tahun sebelumnya

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Jumlah pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL dari target 50 kelompok terealisasi 66%, pembinaan kelompok saasarannya pada kelompok Bina Keluarga Balita , kelompok Bina Keluarga Remaja dan kelompok Bina keluarga Lansia.
2. Jumlah kelompok BKB yang mengikuti orientasi BKB terealisasi 100% ,
3. Jumlah kelompok PIK Remaja yang mengikuti orientasi Genre terealisasi 100%

6. Esselon III (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) B

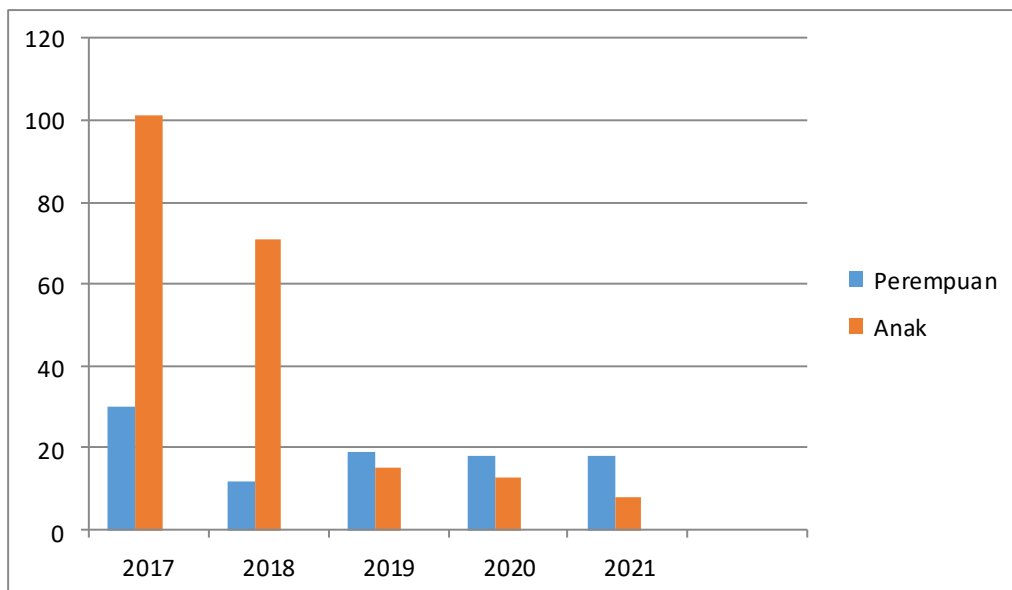
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	Persentase penanganan Pengaduan	%	100%	100%	Kasus terselesaikan 26 kasus

Dalam melaksanakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pelayanan terpadu dalam suatu wadah yang bernama P2TP2A.

P2TP2A yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi : pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, pelayanan medis dengan rujukan secara gratis. Tujuannya yaitu melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET RENSTR A 2023
4.	~ Prosentase perempuan korban kekerasan	100 (30 kasus)	100 (12 kasus)	100 (19 kasus)	100 (18 kasus)	100 (18 kasus)	100
	~Prosentase anak korban Kekerasan	100 (101 kasus)	100 (71 kasus)	100 (15 kasus)	100 (13 Kasus)	100 (8 Kasus)	100



Rata-rata capaian kinerja bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tahun 2021 dari pengaduan kekerasan 26 kasus bisa terselesaikan 100%

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan pengaduan kasus kekerasan tahun 2021 (26) kasus dengan tahun 2020 (31) kasus terjadi penurunan jumlah kasus dan bisa terselesaikan 100%.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

1. Prosentase **perempuan korban** kekerasan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 terselesaikan 100% dari jumlah yang mengadu sebanyak 18 kasus.
2. Prosentase **anak korban** kekerasan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 terselesaikan 100% dari jumlah yang mengadu sebanyak 8 kasus.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	578.089.417

2	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	32.111.500
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	71.658.300
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	117.867.000
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.702.436
4	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125.422.210
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21.415.000
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	113.675.000
JUMLAH				1.094.940.863

e. Analisis Realisasi Anggaran Program

Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hampir terlaksana secara keseluruhan dengan jumlah pagu sebesar Rp.1.094.940.863,- terealisasi sebesar Rp. 563.015.630,- dengan prosentase capaian 51,42%.

6.1 Esselon IV . Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak B.7

Tabel berikut dibawah ini memperlihatkan target realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak tahun 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100	100	100
2.	Melaksanakan Fasilitasi Korban Kasus yang berhubungan dengan Hukum	Jumlah Korban Kasus yang berhubungan dengan Hukum	100	100	100
3.	Melaksanakan Fasilitasi Visum Korban ke Rumah Sakit	Jumlah Korban yang di Visum ke Rumah Sakit	100	100	100
RATA - RATA CAPAIAN					100

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata- rata capaian kinerja Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak terealisasi 100, hal ini menunjukkan pengaduan kasus kekerasan pada perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut diselesaikan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan Pencapaian kinerja tahun 2021 (100%) dan Tahun 2020 (100%) , hal ini menunjukkan pengaduan dan penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dan anak diselesaikan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut dari pengaduan sebanyak 26 kasus terselesaikan dengan baik dan sesuai prosedur.
- Jumlah korban kasus yang berhubungan dengan hukum dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk ditindak lanjutnya sebagai mana hukum yang berlaku
- Jumlah korban yang di visum ke Rumah Sakit bekerja sama dengan Dinas instansi terkait (Psikologi) untuk merawat kasus tersebut.

6.2 Esselon IV. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan B.8

Tabel dibawah ini memperlihatkan target realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan tahun 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Melakukan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kelompok Home Industri Perempuan yang Dibina	38 Kelompok	38 Kelompok	100
2	Melakukan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	29 Organisasi	29 Organisasi	100
3	Melaksanakan Kegiatan Hari-Hari Besar	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	5 Kali	4 Kali	80
4	Melakukan Koordinasi dengan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan	15 Organisasi	15 Organisasi	100
RATA- RATA CAPAIAN					95

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata- rata capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan terealisasi 95%, hal ini menunjukkan pembinaan pemberdayaan perempuan , pembinaan organisasi perempuan dan koordinasi dengan organisasi perempuan di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan pembinaan pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi perempuan dan koordinasi dengan organisasi perempuan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sebesar 95% dan tahun 2020 bisa dilaksanakan 100%.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

- Jumlah kelompok home industri perempuan yang dibina Jumlah peserta Jambore FAD yang terfasilitasi Jumlah organisasi perempuan yang dibina di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah Organisasi yang dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

6.3 Esselon IV Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak B.9

Tabel dibawah ini memperlihatkan target realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Jambore Forum Anak Daerah	Jumlah Peserta Jambore FAD yang terfasilitasi	40 Peserta	40 Peserta	100
2.	Melakukan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Jumlah Lembaga PUG dan Anak yang Mengikuti Sosialisasi	3 Kali Sosialisasi	3 Kali Sosialisasi	100
3.	Melakukan Bimtek Petugas Kota Layak Anak	Jumlah Petugas KLA yang Bersertifikat	25 Orang	25 Orang	100
4.	Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100
5.	Melaksanakan Monev tentang Keterlibatan Forum Anak Daerah	Jumlah Monev tentang Keterlibatan Forum Anak Daerah	3 Kali	3 Kali	100
RATA- RATA CAPAIAN					100

a. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Rata- rata capaian kinerja Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak terealisasi 100, hal ini menunjukkan fasilitasi Jambore Forum Anak Daerah, sosialisasi Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak, Bimtek Petugas KLA, Monev tentang keterlibatan Forum Anak Daerah di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan fasilitasi Jambore Forum Anak Daerah, sosialisasi Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak, Bimtek Petugas KLA, Monev tentang keterlibatan Forum Anak Daerah di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dengan tahun 2020 bisa dilaksanakan 100%.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

- Jumlah peserta Jambore FAD yang terfasilitasi di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah lembaga PUG dan Anak yang mengikuti Sosialisasi di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah petugas KLA yang bersertifikat di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah kegiatan rapat koordinasi di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah Monev tentang keterlibatan Forum Anak Daerah di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	5.272.728.544,-	4.476.686.354,-
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.584.771.614,-	3.851.648.417,-

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.584.771.614,-	3.851.648.417,-
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.612.000,-	148.627.748,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.840.200,-	2.422.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.155.920,-	20.604.960,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.502.000,-	9.304.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000,-	2.520.000,-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.593.880	113.776.788,-
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.530,-	0
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.530,-	0
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.718.248,-	250.851.137,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.600,-	264.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.040.600,-	59.451.479,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.687.048,-	191.135.658,-
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.010.552,-	179.899.052,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000,-	31.981.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.060.552,-	142.728.452,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.950.000,-	5.189.600,-
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.637.600,-	45.660.000,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	22.429.440,-	20.160.000,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.208.160,-	25.500.000,-
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	226.784.206,-	205.720.466,-
1	Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan	68.437.420,-	58.019.460,-

	Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
	Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Program KKBPK	26.124.480,-	23.145.160,-
	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	42.312.940,-	34.874.300,-
2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	158.346.786,-	147.701.006,-
	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	42.995.280,-	32.950.000,-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	17.100.000,-	17.100.000,-
	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	52.837.970,-	52.768.470,-
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	45.413.536,-	44.882.536,-
III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	5.169.876.746	4.062.125.824,-
1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.086.315.720,-	774.272.748,-
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.093.970,-	69.939.176,-
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	206.177.844,-	132.290.030,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	810.043.900,-	572.043.542,-
2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.085.528.740,-	2.066.160.500,-
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.085.528.740,-	2.066.160.500,-
3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.439.782.286,-	820.107.576,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	793.217.296,-	271.672.576,-

	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.740.310,-	19.425.000,-
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50.247.000,-	28.300.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	568.577.680,-	500.710.000,-
4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	558.250.000,-	401.585.000,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	558.250.000,-	401.585.000,-
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	999.038.735,-	430.049.452,-
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	999.038.735,-	430.049.452,-
1	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38.659.600,-	22.825.000,-
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	64.164.546,-	53.809.076,-
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	62.414.596,-	57.905.376,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	608.800.000,-	75.910.000,-
	Sub Kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	224.999.993,-	219.600.000,-

	Keluarga/UPPKS)		
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	260.512.210,-	87.672.035,-
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	146.837.210,-	65.377.630,-
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125.422.210,-	57.057.630,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	21.415.000,-	8.320.000,-
2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.675.000,-	22.294.405,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	113.675.000,-	22.294.405,-
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	34.702.436,-	32.602.636,-
1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34.702.436,-	32.602.636,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.702.436,-	32.602.636,-
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	221.636.800,-	53.318.276,-
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	103.769.800,-	47.948.276,-
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	71.658.300,-	39.183.276,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	32.111.500,-	8.765.000,-
2	Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	117.867.000,-	5.370.000,-

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	117.867.000,-	5.370.000,-
VII	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	578.089.417,-	389.422.683,-
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	578.089.417,-	389.422.683,-
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	578.089.417,-	389.422.683,-
TOTAL		12.763.369.094,-	9.737.597.726,-

2. Anggaran dan realisasi Menurut Sasaran dan Program

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Sasaran Program
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	5.272.728.544,-	4.476.686.354,-	Nilai Sakip (skor) BB (71,58)
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.584.771.614,-	3.851.648.417,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.584.771.614,-	3.851.648.417,-	
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.612.000,-	148.627.748,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.840.200,-	2.422.000,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.155.920,-	20.604.960,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.502.000,-	9.304.000,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000,-	2.520.000,-	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.593.880	113.776.788,-	
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.530,-	0	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.530,-	0	
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.718.248,-	250.851.137,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.600,-	264.000,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.040.600,-	59.451.479,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.687.048,-	191.135.658,-	
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.010.552,-	179.899.052,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	39.000.000,-	31.981.000,-	

	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.060.552,-	142.728.452,-	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.950.000,-	5.189.600,-	
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.637.600,-	45.660.000,-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	22.429.440,-	20.160.000,-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.208.160,-	25.500.000,-	
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	226.784.206,-	205.720.466,-	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,9%
1	Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	68.437.420,-	58.019.460,-	
	Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Program KKBPK	26.124.480,-	23.145.160,-	
	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	42.312.940,-	34.874.300,-	
2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	158.346.786,-	147.701.006,-	
	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	42.995.280,-	32.950.000,-	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	17.100.000,-	17.100.000,-	

	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			
	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	52.837.970,-	52.768.470,-	
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	45.413.536,-	44.882.536,-	
III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	5.169.876.746	4.062.125.824,-	Total Fertility Rate (TFR) 2,32
1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.086.315.720,-	774.272.748,-	
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.093.970,-	69.939.176,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	206.177.844,-	132.290.030,-	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	810.043.900,-	572.043.542,-	
2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.085.528.740,-	2.066.160.500,-	
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.085.528.740,-	2.066.160.500,-	
3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.439.782.286,-	820.107.576,-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	793.217.296,-	271.672.576,-	
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.740.310,-	19.425.000,-	
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	50.247.000,-	28.300.000,-	

	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	568.577.680,-	500.710.000,-	
4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	558.250.000,-	401.585.000,-	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	558.250.000,-	401.585.000,-	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	999.038.735,-	430.049.452,-	Total Fertility Rate (TFR) 2,32
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	999.038.735,-	430.049.452,-	
1	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38.659.600,-	22.825.000,-	
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	64.164.546,-	53.809.076,-	
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	62.414.596,-	57.905.376,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	608.800.000,-	75.910.000,-	
	Sub Kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	224.999.993,-	219.600.000,-	

	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	260.512.210,-	87.672.035,-	KLA Skor Pratama (551)
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	146.837.210,-	65.377.630,-	
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125.422.210,-	57.057.630,-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	21.415.000,-	8.320.000,-	
2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.675.000,-	22.294.405,-	KLA Skor Pratama (551)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	113.675.000,-	22.294.405,-	
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	34.702.436,-	32.602.636,-	KLA Skor Pratama (551)
1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34.702.436,-	32.602.636,-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.702.436,-	32.602.636,-	
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	221.636.800,-	53.318.276,-	IDG 72,80
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	103.769.800,-	47.948.276,-	
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan	71.658.300,-	39.183.276,-	

	Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	32.111.500,-	8.765.000,-	
2	Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	117.867.000,-	5.370.000,-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	117.867.000,-	5.370.000,-	
VII	1. PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	578.089.417,-	389.422.683,-	IDG 72,80
1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	578.089.417,-	389.422.683,-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	578.089.417,-	389.422.683,-	
3.	TOTAL	12.763.369.094,-	9.737.597.726,-	

3. Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	5.272.728.544,-
Belanja Pegawai	3.899.923.600,-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.584.771.614,-
		Sub Kegiatan	4.584.771.614,-

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	814.985.554,-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.612.000,-
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.840.200,-
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.863.900,-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.155.920,-
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	12.502.000,-
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000,-
Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	250.622.861,-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.593.880
Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	7.019.600,-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.530,-
Penyusunan Perencanaan dan kinerja SKPD	3.554.100,-		
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	3.456.500,-	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.530,-
Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	372.498.793,-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.718.248,-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.600,-

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.040.600,-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.687.048,-
Pemenuhan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumberdaya Manusia	110.852.342	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.010.552,-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000,-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.060.552,-
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	90.702.342,-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.950.000,-
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.637.600,-
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	22.429.440,-
Pengadaan Sarana dan prasarana perkantoran	20.150.000,--	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	26.208.160,-

		Kantor atau Bangunan Lainnya	
Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	20.000.000,--		
Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan	20.000.000,--		
Advokasi dan Pengendalian Penduduk	176.151.332,-	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	226.784.206,-
		Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	68.437.420,-
		Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Program KKBPK	26.124.480,-
		Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	42.312.940,-
		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	158.346.786,-
		Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK	42.995.280,-

		di Sektor Lain	
Pengelolaan Sistem informasi manajemen Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	81.502.732,-	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	17.100.000,-
Monev dan Pendataan Keluarga	23.801.700,-	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	52.837.970,-
		Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	45.413.536,-
Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera	1.820.587.025,-	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	5.169.876.746
Advokasi dan KIE Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga(KKBPK)	70.846.900,-	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.086.315.720,-
		Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.093.970,-
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	206.177.844,-
Operasional bagi Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	958.010.120,-	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	810.043.900,-
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2.922.444.220,-	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh	2.085.528.740,-

(KKBPK) Lini Lapangan		KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
		Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.085.528.740,-
Monev pelayanan KB dan pengelolaan alokon	292.392.000,-	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.439.782.286,-
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	793.217.296,-
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejarangnya	27.740.310,-
Operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) (DAK non Fisik)	29.065.000,-	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	50.247.000,-
Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Pelayanan KB	126.500.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	568.577.680,-
Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Penyuluhan KB	469.200.00,-		

Operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik)	862.528.000,-	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	558.250.000,-
		Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	558.250.000,-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	999.038.735,-
Pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	1.472.539.900,-	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	999.038.735,-
		Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38.659.600,-
		Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS,	64.164.546,-

		PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	55.718.125,-	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	62.414.596,-
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	608.800.000,-
		Sub Kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	224.999.993,-
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	260.512.210,-
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	146.837.210,-
		Sub Kegiatan Advokasi	125.422.210,-

		Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	21.415.000,-
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.675.000,-
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	113.675.000,-
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	34.702.436,-
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34.702.436,-
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	34.702.436,-

		Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	221.636.800,-
Pembinaan pemberdayaan perempuan, organisasi perempuan dan kesetaraan gender	320.158.735,-		
Pendampngan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak	107.805.905,-	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	103.769.800,-
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan KewenanganKabupaten/ Kota	71.658.300,-
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	32.111.500,-
		Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	117.867.000,-

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	117.867.000,-
Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	94.199.720,-	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN	578.089.417,-
Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	94.199.720,-	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	578.089.417,-
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan PemberdayaanPerempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	578.089.417,-
	6.989.895.433,-		12.763.369.094,-

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2021 mendapatkan Alokasi anggaran sebesar Rp. 12.763.369.094,- yang bersumber dari :

1. Dana APBD Kabupaten Tanah Laut Rp. 8.256.838.207,-
2. Dana DAK Fisik Reguler/Fisik Penugasan Penurunan Stunting bid. Kesehatan dan KB Subbid KB sebesar Rp. 793.577.673,-
3. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp. 3.427.884.714,- dan

4. Dana Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak (BOPPA.) Rp. 285.068.500,-

Dari dana yang dialokasikan terealisasi sebesar Rp. 9.737.597.726,- dengan capaian realisasi keuangan 76,29%. Secara umum pencapaian target keuangan sudah cukup baik namun ada beberapa kendala dalam pencapaian target diantaranya pada kegiatan dana yang bersumber pada DAK BOKB dan DAK BOPPA yaitu :

1. Penetapan DPA pada akhir bulan Pebruari 2021 sehingga kegiatan mulai efektif di bulan Maret 2021, dan beberapa kegiatan di bulan Januari 2021 yang direncanakan menggunakan anggaran DAK BOKB dan BOPPA tidak dapat direalisasikan.
2. Alokasi dana untuk biaya medikolegal sangat besar, sementara kasus yang perlu pelayanan tersebut sangat terbatas (sedikit)
3. Juknis kegiatan dana DAK berbeda dengan tahun sebelumnya dan baru diterima di awal tahun 2021 sehingga perlu waktu untuk melakukan sosialisasi kepada petugas atau pelaksanaan kegiatan.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut pertama kali menerima dan mengelola Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2021.
5. Terjadinya pergantian PPTK yang baru sehingga kondisi ini menyebabkan informasi banyak yang terputus.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan penyelenggaraan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut 2019-2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

- SASARAN 1** : Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan indikator adalah :
- Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) realisasi 0,9 dari target 1,61 dengan capaian kinerja 144,10%.
- SASARAN 2** : Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun dengan indikator adalah :
- Persentase Total Fertility Rate (TFR) realisasi 2,32 dari target 2,27 dengan capaian kinerja 97,80%
- SASARAN 3** : Meningkatnya Kesenjangan Gender dengan indikator adalah :
- Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi 70,67% dari target 68,42 dengan capaian kinerja 103,28%
- SASARAN 4** : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator adalah :
- Skor capaian Kota Layak Anak (KLA) realisasi skor 551 (Pratama) dari target 700 (Madya) dengan capaian kinerja 78,71%.
- SASARAN 5** : Meningkatnya penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan realisasi sebesar 100 dari target 100 % dengan capaian kinerja 100%.
- SASARAN 6** : Meningkatnya pemahaman remaja tentang ber KB dengan indikator prosentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB dengan target 90% terealisasi 83,28% dengan capaian kinerja 92,53%.

- SASARAN 7 : Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera(KS) dengan indikator Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need) realisasi sebesar 8,56% dari target 9,00 % dengan capaian kinerja 104,89 %.
- SASARAN 8 : Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan perempuan dan Anak indikator prosentase penanganan pengaduan perempuan anak korban tindak kekerasan teralisasi 100% . Tertindak lanjuti dari jumlah 26 kasus
- SASARAN 9 : MeningkatnyaAkuntabilitas kinerja SKPD dengan indikator 1) persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian target 100% tercapai 100% dengan capaian kinerja 100%, 2) persentase perencanaan dan keuangan SKPD target 100% tercapai 100% dengan capaian kinerja 100%, 3) nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah SKPD target 75 (BB) tercapai 71,58 (BB) dengan capaian kinerja 100%

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Memperkuat budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai *good corporate governance* (tata kelola organisasi yang baik) dan berorientasi pada *outcome*
2. Melakukan perencanaan kinerja tahunan SKPD yang selaras dengan RPJMD dan IKU SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..
3. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level Eselon III, Eselon IV dan individu pegawai.
4. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;
5. Membuat terobosan/inovasi yang dapat mempercepat pencapaian kinerja Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak:

6. Evaluasi kinerja dilakukan setelah pencapaian target kinerja yang ditentukan dan hasil dijadikan umpan balik. Dari hasil evaluasi kinerja akan mendapatkan penilaian kinerja serta rekomendasi-rekomendasi supaya menjadi bahan pertimbangan perbaikan kinerja. Dalam tahap evaluasi, melibatkan berbagai pihak agar penilaian dapat obyektif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang dapat disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, Maret 2022

Kepala Dinas,



Ir. NOR HIDAYAT

Pembina Utama Muda/(IV/c)

NIP. 19630824 199403 1 007

LAMPIRAN PENGHARGAAN

1. PENGHARGAAN MANGGALA KARYA KENCANA (MKK) KEPADA BUPATI TANAH LAUT

Manggala Karya Kencana (MKK) merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk.

Pada tahun 2021, Bupati Tanah Laut meraih penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) yang diserahkan pada acara Gebyar Penghargaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2021 dalam rangkaian Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-28 secara virtual di Ruang Barakat Setda Tala, Senin (28/06).

Penghargaan Manggala Karya Kencana diterima Bupati Tanah Laut H. M. Sukamta karena telah mempunyai dedikasi, komitmen, dukungan dan dharma baktinya yang besar dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Tanah Laut.

Foto Penyerahan Penghargaan Manggala Karya Kencana Secara Virtual:



Foto Penyerahan Piagam Penghargaan Manggala Karya Kencana Secara Lansung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan 08 Oktober 2021 :



2. PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK 2021

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Perolehan ini merupakan hasil dari menguatnya peran seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak dan melindungi anak-anak di Kabupaten Tanah Laut

Pada 29 Juli 2021 Acara Penghargaan Kabupaten/Kota

Layak Anak (KLA) 2021 yang digelar secara virtual diikuti oleh Bupati Tanah Laut beserta jajarannya. Tanah Laut mendapatkan penghargaan tingkat Pratama.

**FOTO PENERIMAAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021
OLEH KEMENTERIAN PPPA RI KEPADA BUPATI TANAH LAUT
SECARA VIRTUAL**





LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN : I (JANUARI - MARET) TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN (2019)	CAPAIAN TAHUN (2020)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN (TW I)			TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN	
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,21 (19=349,826 18=347,893)*100%	1,21 (348,623- 349,826*100%)	%	1,61	-	-	1,56
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	2,99 (2.227/167.5715x0,45)	2,81 (6.510/11.5450x5)	%	2,27	-	-	2,22
3	Meningkatnya Kualitas hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,67	70,67	%	68,44	-	-	68,48
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Kota Layak Anak	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	Skor	700 (Madya)	-	-	700 (Madya)

Pelatihari, April 2021
 PIt. Kepala Dinas P2KBP3A
 Kabupaten Tanah Laut

Drs. HUSEIN IRIANTA
 NIP. 19630720 198503 1 015

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN : II (APRIL-JUNI) TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN (2019)	CAPAIAN TAHUN (2020)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN (TW I)			TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN	
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,21 (19=349.826 18=347.893)*100%	1,21 (348.623- 349.826*100%)	%	1,61	-	-	1,56
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	2,99 (2.227/167.5715x0,45)	2,81 (6.510/11.5450x5)	%	2,27	1,21 (2.678/1104 9x5)	-	2,22
3	Meningkatnya Kualitas hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,67	70,67	%	68,44	-	-	68,48
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Kota Layak Anak	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	Skor	700 (Madya)	-	-	700 (Madya)

Pelaihari, 10 Juli 2021

Pt. Kepala Dinas P2KBP3A

Kabupaten Tanah Laut


Drs. H. ZAINAL ABIDIN
 NIP. 19641013 198603 1 012

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN : III TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN (2020)	SATUAN	TAHUN 2021	
					TARGET	REALISASI s.d OKTOBER
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,21	%	1,61	-
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	2,81	Anak	2,27	1,21
3	Meningkatnya Kualitas hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,67	%	68,44	-
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Kota Layak Anak	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	551 (Pratama)	Skor	700 (Madya)	551 (Pratama)

Mengetahui,
Kepala Dinas


Ir. NOR HIDAYAT
NIP. 19630824 199403 1 007

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN : IV TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN (2020)	SATUAN	TAHUN 2021	
					TARGET	REALISASI s.d OKTOBER
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,21	%	1,61	0,9
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	2,51	Anak	2,27	2,32
3	Meningkatnya Kualitas hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,67	%	68,44	72,8
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Kota Layak Anak	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	551 (Pratama)	Skor	700 (Madya)	551 (Pratama)

Mengetahui,
Kepala Dinas

Ir. NOR HIDAYAT

NIP. 19630824 199403 1 007